

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) DALAM PROSES  
PENGENDALIAN PENDUDUK DI KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR**

Claudia Andriani Nono

NPP. 31.0771

*Asdaf Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

*Email : [andhynenono@gmail.com](mailto:andhynenono@gmail.com)*

Pembimbing Skripsi : Suraji, S.Sos., M.AP

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** Population control is an endeavor undertaken by governments or relevant institutions to regulate the growth of the human population within a specific region. The primary objective of population control is to maintain a balance between the population size and the available resources while minimizing the potential negative impacts resulting from uncontrolled population growth. Through the implementation of the *Bangga Kencana* Program, an increase in community awareness and participation in population control efforts is anticipated, ultimately contributing to sustainable development and societal welfare. **Purpose:** The purpose of this research is to formulate the implementation of the *Bangga Kencana* program, identify the challenges, and outline the efforts in the population control process in Ngada Regency. **Methods:** The data collection technique in this thesis employs a descriptive qualitative method with a case study research approach. The researcher used purposive sampling to select informants. Data was collected using triangulation techniques as described by Sugiyono (2014:224), which includes interviews, observations, and documentation. The data analysis technique used follows the model by Miles and Huberman (2014:20), which involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of this research indicate that the implementation of the *Bangga Kencana* Program in Ngada Regency by the Population Control and Family Planning Agency of Ngada Regency has been running well according to existing indicators. However, there are still some challenges, such as those related to resource indicators, including human resources, budget, facilities, and infrastructure, as well as the disposition indicator (the attitude of the implementers themselves). Therefore, the DPPKB of Ngada Regency continues to strive to improve the implementation of the *Bangga Kencana* program to achieve the desired goals. **Conclusion:** The implementation of the *Bangga Kencana* Program in Ngada Regency by the Population Control and Family Planning Agency of Ngada Regency has been running well according to existing indicators. However, several challenges remain, such as resource indicators including human resources, budget, facilities, and infrastructure, as well as the disposition

indicator (the attitude of the implementers themselves). The challenges identified are: firstly, the resource indicators, including human resources (staff) that are still lacking in terms of number and capability, the insufficient budget for program implementation, and the inadequate facilities and infrastructure both in quantity and quality. Additionally, the attitude of the task executors also determines the success of a program. Efforts made by the DPPKB of Ngada Regency include increasing the number and quality of staff through training and education, allocating funds to meet the needs for facilities and infrastructure, and conducting socialization.

**Keywords:** Bangga Kencana, Population Control

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Pengendalian penduduk merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur pertumbuhan populasi manusia dalam suatu wilayah. Tujuan utama dari pengendalian penduduk adalah untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Melalui implementasi Program Bangga Kencana, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian penduduk, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merumuskan implementasi program Bangga Kencana, tantangan serta upaya dalam proses pengendalian penduduk di Kabupaten Ngada. **Metode:** Teknik pengambilan data pada skripsi ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *case study research* (studi kasus), untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi data menurut Sugiyono (2014:224) yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (2014:20) yaitu reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator yang ada, namun masih terdapat beberapa tantangan seperti pada indikator sumber daya baik dari sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana juga pada indikator disposisi (sikap implementor itu sendiri) sehingga DPPKB Kabupaten Ngada terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan program Bangga Kencana sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. **Kesimpulan:** Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada sudah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator yang ada, namun masih terdapat beberapa tantangan seperti pada indikator sumber daya baik dari sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana juga pada indikator disposisi (sikap implementor itu sendiri). Tantangan-tantangan yang ditemui yaitu yang pertama pada indikator sumber daya baik sumber daya manusia (staf) yang masih kurang dari segi jumlah maupun kemampuan, anggaran yang masih kurang dalam melaksanakan program serta sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan juga masih kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, selain itu sikap para pelaksana tugas juga menjadi penentu berhasil tidaknya sebuah program dijalankan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Ngada yaitu

meningkatkan jumlah dan kualitas staf melalui pelatihan dan diklat, mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan sosialisasi.

**Kata Kunci:** Bangga Kencana, Pengendalian Penduduk

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dinyatakan bahwa pengendalian penduduk merupakan upaya untuk mengendalikan kuantitas penduduk, meningkatkan kualitas penduduk, dan pengendalian mobilitas/migrasi penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Pengendalian penduduk dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dengan jumlah penduduk yang lebih terkendali, pemerintah dapat lebih mudah menyediakan layanan dasar dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 278,69 juta penduduk pada pertengahan tahun 2023, angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk di Indonesia sebesar 275,77 juta jiwa (BPS Indonesia, 2023). Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi di Provinsi NTT khususnya Kabupaten Ngada. Jumlah penduduk Kabupaten Ngada telah mencapai 170,222 jiwa pada pertengahan tahun 2023 (BPS Kabupaten Ngada, 2023). Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk saat ini menjadi permasalahan pokok yang cukup mendasar. Apabila tidak ada intervensi dari pemerintah dalam meningkatkan program Keluarga Berencana jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi ini dapat berdampak kepada bidang sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pengendalian penduduk juga dapat meningkatkan kualitas dari suatu penduduk. Kualitas hidup manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Indonesia telah mencapai 72,91 pada pertengahan tahun 2023 (BPS Indonesia, 2023). Berdasarkan capaian IPM Indonesia tahun 2023 tersebut posisi Indonesia sekarang berada pada urutan 75 dari 132 negara di dunia. Capaian IPM di Kabupaten Ngada sebesar 68,26 (BPS Kabupaten Ngada, 2023) menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Ngada masih tergolong sedang, artinya efisiensi pembangunan relatif baik.

Aspek kualitas penduduk semestinya harus menjadi perhatian semua pihak dalam proses pembangunan yang akan dilakukan. Sehingga, untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dan tahun emas Indonesia pada tahun 2045 dilakukan dengan meningkatkan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga (Lubis & Mulianingsih, 2019).

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk yang harus didukung melalui kebijakan pembangunan kependudukan. (Gatiningsih & Sutrisno, 2017).

Dalam mencapai cita-cita bersama menuju penduduk yang sejahtera dan berkualitas harus didukung dari kebijakan pembangunan kependudukan. Pembangunan kependudukan sendiri tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, khususnya untuk parameter bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana - Bangsa Kencana) sampai tingkat kabupaten dan kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui pengelolaan populasi dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

Dari data-data yang ada di atas permasalahan kependudukan di Kabupaten Ngada terdapat pada aspek kuantitas dan kualitas penduduk yang ditandai dengan tingginya tingkat kelahiran, tingginya angka kemiskinan, tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi tinggi serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pemahaman tentang kontrasepsi. Permasalahan kependudukan ini perlu untuk segera dikaji dan dicari cara serta solusi pemecahannya oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ngada menginginkan yang terbaik bagi masyarakatnya agar dapat tercipta masyarakat Kabupaten Ngada yang sejahtera dan berkualitas.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Beberapa masalah permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu pertama Program Bangsa Kencana merupakan program baru yang sebenarnya memiliki peran yang penting untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dan tahun emas Indonesia pada tahun 2045, namun belum bisa dijalankan dengan baik karena masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan seperti kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarananya dalam menjalankan program ini. Selain itu, masyarakat belum menerima dan memahami dengan baik Program Bangsa Kencana karena masyarakat beranggapan bahwa program ini merupakan program untuk membatasi jumlah anak dalam satu keluarga, sedangkan tujuan Program Bangsa Kencana ini sebenarnya adalah mencakup berbagai kegiatan dan layanan, seperti penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, perencanaan keluarga, pendidikan seksual, serta dukungan untuk perempuan dalam mengatur jumlah anak sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui pengelolaan populasi dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya pertama, Penelitian Putri dkk dengan judul *Peran Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Bangsa Kencana* menyimpulkan bahwa peran humas sebagai komunikator sangat penting dalam menciptakan persepsi masyarakat terkait program Bangsa Kencana. Praktisi humas BKKBN Provinsi Riau harus lebih berupaya untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi kader pelaksana penyuluhan KB dan pendamping keluarga di usia subur, hal ini dilakukan agar keluarga berisiko stunting dapat memperoleh pendampingan (Putri, dkk., 2022). Kedua, Penelitian Novita dkk yang berjudul *Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kota Samarinda* menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bangsa Kencana di Kota Samarinda melakukan perubahan pada Grand Design Pembangunan dengan mengubah *rebranding logo*, dan

*tagline jingle* sehingga program ini dapat dikenal oleh publik terutama bagi anak muda. Pada sosialisasi Program Bangga Kencana terdapat kendala karena pandemi Covid-19 namun tetap diusahakan untuk dilakukan secara maksimal dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan (Novita, dkk., 2021). Ketiga, Penelitian Admaja dkk yang berjudul *Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda* menyimpulkan bahwa Peran yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Samarinda sudah dijalankan dengan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Kajian tersebut juga menyoroti perlunya DPPKB lebih memperhatikan penyediaan fasilitas pendukung kegiatannya, karena hal ini sangat penting untuk pengendalian populasi yang efektif di Kota Samarinda (Admaja, dkk., 2019). Keempat, Penelitian Purba yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam Mengurangi Jumlah Angka Kelahiran di Kota Medan* menyimpulkan bahwa penerapan program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Medan untuk menurunkan fertilitas belum efektif. Program tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan kelompok sasaran yang dibentuk di setiap lingkungan tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah keluarga. DPPKB disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi upaya antara PPKB dengan kegiatan pembangunan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja (Purba, 2018). Kelima, Muaya dkk yang berjudul *Efektivitas Program KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa* menyimpulkan bahwa Program KB di Kabupaten Minahasa belum cukup efisien yang disebabkan karena kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan, selain itu Program KB ini tidak hanya dilakukan untuk menekan jumlah kelahiran bayi tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk, membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi, serta mencegah pernikahan di usia dini (Muaya, dkk., 2023).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian ini dilakukan dalam upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Ngada yang dilakukan melalui implementasi Program Bangga Kencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berbeda dengan penelitian Putri dkk (2022), Novita dkk (2021), Admaja dkk (2019), Purba (2018), Muaya dkk (2023).

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Bangga Kencana dalam proses pengendalian penduduk di Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada.

## II. METODE

Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *case study research* (studi kasus) menurut (Arikunto, 2013). Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data menurut Sugiyono (2014:224) yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (2014:20) yaitu reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi untuk menunjang keberhasilan implementasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Ngada tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan parameter Program Bangsa Kencana tahun 2022-2023. Berdasarkan hasil dari program Bangsa Kencana tersebut dapat kita lihat dari capaian TFR, ASFR (15-19 tahun), MUKP dan mCPR di Kabupaten Ngada.

**Tabel 1.1**

**Parameter Program Bangsa Kencana Kabupaten Ngada Tahun 2022-2023**

NO	PARAMETER	2022	TARGET 2023
1	2	3	4
1.	TFR	2,47	2,21
2.	ASFR	11,3	21
3.	MUKP	24,9	22
4.	mCPR	43,31	62,54

*Sumber: Buku Parameter Program Bangsa Kencana Tingkat Kabupaten Tahun 2023*

**Pada Tabel 1.1** TFR di Kabupaten Ngada sebesar 2,47 (belum mencapai target nasional karena masih cukup tinggi yaitu di atas 2,21 sehingga masih dibutuhkan perhatian pada tingkat kesehatan, pendidikan serta pendapatan). Kemudian untuk capaian ASFR sebesar 11,3 (sudah mencapai target nasional 21, namun tetap memperhatikan angka perkawinan muda, kemiskinan, pendidikan, kespro remaja, serta stunting). Selanjutnya untuk capaian MUKP 24,9 (sudah capai target nasional 22, namun tetap perlu diperhatikan pendewasaan usia perkawinan sehingga potensi kehamilan berisiko dapat dicegah). Capaian mCPR 43,31 (belum mencapai target nasional 62,54 dan masih sangat rendah sehingga sangat membutuhkan perhatian ekstra dan intervensi pada advokasi KIE dan peningkatan pelayanan kontrasepsi).

### **3.1 Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) di Kabupaten Ngada**

Dalam Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) dalam proses pengendalian penduduk di Kabupaten Ngada peneliti menggunakan indikator teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang peneliti kutip dari Leo Agustino, ada empat indikator untuk mengukur pencapaian tujuan yang diinginkan dari

suatu kebijakan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi (Agustino, 2020). Berdasarkan teori tersebut serta data-data yang terkumpul selama proses penelitian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada melibatkan penyampaian informasi dari DPPKB Kabupaten Ngada yang bertindak sebagai pelaksana teknis. DPPKB berkoordinasi dengan semua instansi terkait serta masyarakat untuk upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Ngada.

Proses penyampaian informasi terkait implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh KB dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dilakukan melalui penyuluhan secara langsung kepada keluarga dengan sasaran penyuluhannya yaitu pasangan calon kawin, ibu hamil, dan juga akseptor KB yang dilaksanakan sebanyak 10 kali tiap kecamatan dalam 1 tahun anggaran kerja. Selain itu, media elektronik, media cetak dan juga media online juga turut digunakan untuk mensosialisasikan terkait Program Bangga Kencana agar program ini dapat dikenal luas oleh masyarakat. Kejelasan dalam penyampaian informasi juga harus diperhatikan, dan tidak membingungkan (tidak ambigu) agar masyarakat dapat mengetahui apa itu program Bangga Kencana.

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia merupakan peran yang sangat penting dalam Implementasi Program Bangga Kencana. Adapun jumlah sumber daya manusia di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada sebanyak 107 orang dengan 25 orang di kantor dan 82 orang tersebar di lapangan. Rata-rata dalam satu kecamatan ada 4-5 orang Penyuluh KB sehingga 1 Penyuluh membawahi 3-4 desa dengan jumlah seluruh Penyuluh KB sebanyak 82 orang dan juga dibantu oleh kader yang ada di desa sebanyak 4 orang tiap desa dengan 2 orang Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan 2 orang Sub PPKBD dan juga dibantu oleh tenaga kesehatan.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga berguna dalam menunjang biaya kegiatan sosialisasi mengenai Program Bangga Kencana, pembuatan banner untuk sosialisasi, uang transportasi bagi petugas dan peserta, uang makan, serta honor untuk PPKBD dan Kader TPK. Anggaran dalam implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada berasal dari APBD Kabupaten Ngada dan anggaran DAK dari BKKBN yang disebut Bantuan Operasional KB (BOKB).

Selanjutnya, dari aspek sarana dan prasarana Gedung/Bangunan Kantor DPPKB Kabupaten Ngada merupakan bangunan lama satu lantai yang dioperasikan untuk ruang kerja pimpinan dan staf.

### **3. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Sikap atau disposisi pelaksana mengacu pada karakteristik yang berkaitan erat dengan pelaksana suatu kebijakan. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh para pelaksana adalah kejujuran, dedikasi, dan demokratis. Pelaksana yang memiliki komitmen dan integritas tinggi akan merasa mudah apabila menemui kendala dalam proses implementasi.

Pelaksana program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada sudah cukup menunjukkan komitmen yang tinggi sebagai contoh sikap PLKB di Kabupaten Ngada dalam program Bangga Kencana

sudah cukup baik mengingat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ngada cukup kompleks. PLKB berupaya memberikan kemudahan bagi PPKBD yang memiliki akseptor (masyarakat yang hendak ber-KB) untuk membebaskan masyarakat melakukan pemasangan KB baik di Praktik Mandiri Bidan maupun di puskesmas. Kemudahan inilah yang menjadikan masyarakat mulai mengikuti program Bangga Kencana tanpa harus berpatokan dengan tanggal pelayanan yang rutin diadakan setiap bulan. Sikap baik yang ditunjukkan oleh PLKB Kabupaten Ngada saat ini berbanding terbalik dengan sikap PPKBD dan kader TPK dikarenakan honor yang biasanya dibayarkan kurang tertib dan suka terlambat. Hal ini menjadikan kinerja PPKBD dan kader TPK untuk memberikan pembinaan dan pendampingan untuk masyarakat menurun. Selain itu juga dari DPPKB Kabupaten Ngada selama 2 tahun terakhir ini tidak memberikan pelatihan rutin kepada PPKBD dan para kader sehingga saat masyarakat bertanya para kader dan PPKBD kesulitan untuk menjawab dan menjelaskan lebih lanjut kepada masyarakat.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Perumusan kebijakan dan pengambilan suatu keputusan memerlukan sebuah sistem dalam pelaksanaannya, sehingga struktur birokrasi yang terkait mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa aspek struktural yang paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur operasi dasar atau standar operasional prosedur (SOP). SOP yang dikembangkan dalam suatu organisasi berisi kriteria standar untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis. Namun, beradaptasi dengan organisasi yang menjadikan perubahan sebagai hal yang biasa bisa jadi sulit. Dengan kata lain, semakin kebijakan tersebut memerlukan perubahan kebiasaan organisasi, semakin besar kemungkinan SOP tersebut akan menghambat implementasinya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada sudah cukup baik dalam melayani masyarakat karena sudah sesuai dengan SOP dan tugas pokok fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada.

### **3.2 Tantangan yang dihadapi dalam Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada**

Ditemukan beberapa tantangan yang menjadi penghambat dalam implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada. Berikut yang menjadi tantangannya:

- a. Sumber Daya manusia dalam hal ini jumlah tenaga PLKB (Petugas lapangan Keluarga Berencana) kontrak tidak terlatih di dalam KIE dan Promosi KB.
- b. Kendala finansial menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada selain karena kendala SDM, ketersediaan anggaran untuk menjalankan sebuah program sangatlah penting. DPPKB Kabupaten Ngada memiliki anggaran dari APBD dan anggaran DAK dari BKKBN yang disebut Bantuan Operasional KB atau BOKB. Untuk saat ini DAU yang dialokasikan untuk menjalankan program masih terhitung kecil dan terbantu dengan adanya DAK.
- c. Keterbatasan pelatihan bagi tenaga lini lapangan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas.
- d. Belum/tidak adanya penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan kurangnya analisis mengenai dampak pertumbuhan penduduk. GDPK tidak dilakukan karena



keterbatasan anggaran, Program pengendalian penduduk bukan merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Ngada.

- e. Terjadi pergeseran tenaga di bidang pengendalian penduduk tidak diikuti oleh serah terima program kegiatan dengan detail, sehingga keberlangsungan program tidak optimal, seperti pelaksanaan Pokja Kampung KB, pengisian data-data pada NewSiga, dan pelaksanaan penyuluhan dan penggerakan masyarakat.

### **3.3 Upaya yang Menjadi Solusi dan Pendorong dalam Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada**

Dengan adanya beberapa tantangan dalam implementasi Program Bangga Kencana maka DPPKB Kabupaten Ngada perlu melakukan berbagai upaya sehingga dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut upaya yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Ngada:

- a. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait pentingnya Program Bangga Kencana bisa melalui:
  - 1) Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan generasi muda.
  - 2) Media Luar Ruang berupa: spanduk, mural (cara menggambar atau melukis di atas media dinding tembok atau permukaan luas yang bersifat permanen), Leaflet.
  - 3) Media massa
- b. Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan dalam diklat dan bimtek bagi tenaga lini lapangan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas.
- c. DPPKB Kabupaten Ngada juga mulai menyusun dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengatasi kekurangan dalam sarana dan prasarana yang masih kurang guna mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Program Bangga Kencana dalam proses pengendalian penduduk memberikan dampak yang baik untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat lebih awal lagi mempersiapkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui pengelolaan populasi dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan. Peneliti menemukan temuan penting yaitu Program Bangga Kencana merupakan program baru sehingga masyarakat belum begitu mengenal program tersebut, oleh karena itu peran implementor sangat dibutuhkan dalam sosialisasi terkait program ini sehingga Program Bangga Kencana dapat familiar di masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa sebenarnya Program Bangga Kencana ini. Sama halnya dengan temuan oleh Admaja dkk yang berjudul Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda yaitu membahas tentang peran DPPKB sebagai implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam penelitian oleh Admaja dkk permasalahan kependudukan di Kota Samarinda adalah angka fertilitas dan migrasi yang tinggi sehingga fokus bahasannya adalah terkait peran DPPKB untuk mengatasi permasalahan ini serta apa penghambat DPPKB dalam menanggulangi masalah pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut (Admaja, dkk., 2019). Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan permasalahan kependudukan yaitu mengenai pelaksanaan program Bangga Kencana dalam proses pengendalian penduduk, permasalahan (apa

yang menjadi tantangan) dalam pelaksanaan program tersebut serta upaya yang dilakukan dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Ngada. Seperti temuan oleh Novita dkk yang berjudul Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kota Samarinda membahas tentang pelaksanaan program Bangga Kencana serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Samarinda menunjukkan bahwa program Bangga Kencana ini melakukan Perubahan Grand Design Pembangunan, dengan melakukan perubahan *rebranding logo and tagline jingle* agar program ini dapat dikenal oleh masyarakat terutama kaum generasi millenials dan dapat berkontribusi terhadap program ini (Novita, dkk., 2021). Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan di Kabupaten Ngada belum memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan karena keterbatasan anggaran.

#### IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada sudah berjalan baik sesuai dengan indikator yang ada, namun masih ada beberapa masalah di indikator sumber daya yaitu kurangnya sumber daya manusia (staf yang berkompeten pada bidangnya) serta kurangnya dana (anggaran) untuk menjalankan Program Bangga Kencana ini. Hal tersebut apabila dibiarkan dan terus berlanjut dapat menjadi penghambat keberhasilan dalam menjalankan Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada.

Adapun tantangan dan hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada dalam proses pengendalian penduduk yaitu yang pertama dari segi sumber daya manusia dalam hal ini staf lapangan yang masih kurang serta kurang berkompeten sehingga harus diberikan pelatihan secara berkala. Selain itu sumber daya dari segi anggaran pun turut menjadi tantangan untuk pelaksanaan program dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada maka DPPKB Kabupaten Ngada melakukan beberapa upaya yang menjadi solusi dan pendorong dalam Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Ngada yaitu yang pertama dari segi komunikasi yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ngada dan PLKB yang tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada sudah berjalan dengan baik karena komunikasinya sampai kepada masyarakat yang ingin mengikuti KB. Yang kedua dari segi struktur birokrasi sudah dijalankan sesuai SOP serta selalu dilakukan pengawasan oleh dinas kepada staf di lapangan.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada waktu penelitian yang singkat sedangkan permasalahan yang diteliti tergolong kompleks dan karena keterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti hanya bisa ikut dalam satu kali sosialisasi bangga kencana.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa terkait dengan Program Bangga Kencana dalam proses pengendalian penduduk di Kabupaten Ngada untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Admaja, dkk., 2019. *Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda*. Samarinda
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- BKKBN. 2023. *Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota*. Jakarta: Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN.
- BPS Kabupaten Ngada. 2023. *Kabupaten Ngada Dalam Angka*. Bajawa: BPS Kabupaten Ngada.
- Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Lubis, B., & Mulianingsih, S. (2019). Keterkaitan bonus demografi dengan teori generasi. *Jurnal Registratie, 1*(01), 21–36.
- Muaya, dkk., 2023. *Efektivitas Program Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Governance*, Volume 3 Nomor 1, (Tahun 2023).
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: UI Press.
- Novita, dkk. 2021. *Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kota Samarinda*. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 9 Nomor 1, (Tahun 2021).
- Purba, Budiman. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam Mengurangi Jumlah Angka Kelahiran di Kota Medan*. *Jurnal Publik*, Edisi IV Nomor 4, (Desember 2014).
- Putri, dkk., 2022. *Peran Humas Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program Bangga Kencana*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (16 Februari 2022).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik, “Kependudukan”, dalam <http://www.bps.go.id/> (diakses pada 30 Agustus 2023).
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009> (diakses pada 30 Agustus 2023).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009> (diakses pada 30 Agustus 2023).